

FENOMENA SOSIOLOGIS METAMORPHOSIS PETANI: KE ARAH KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT PETANI DI PEDESAAN YANG TERPINGGIRKAN TERKAIT KONSEP EKONOMI KERAKYATAN

Socio-Metamorphosis Phenomenon of Farmers: Towards the Favor of Disadvantage Farmer's Community in Rural Areas Related to People's Economy Concept

Roosganda Elizabeth

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

The adoption of modernization paradigm which majoring efficiency principle in agricultural development has caused the change in rural peasant social structure. The changes are especially related to farm land ownership creating the substratum of peasant, i.e., the upper and lower level of peasant. All peasant definitions are equal by its diametric and equip by each other, so that it needs a study in relation to its pattern change, interaction, and institution that historically experienced by the peasant society. The influencing development factors affecting peasant daily life should refer to the potential and the empowerment of the society. This is very important in order to adapt and sustain the development without losing the norms, values, and souls of indigenous knowledge. *Ekonomi kerakyatan (people's economy)* concept represents the economic idea trying to formulate the interpretation base and the development aspiration of the people's fairness and prosperity. This concept would become the peasant empowerment base for their prosperity and earnings improvement. Agricultural revitalization is needed to help improve people's quality of life which could be achieved through: active participation of the society, skills development of human resource, improvement of landholdings title and agricultural productive assets on the basis of farm labor, technology and financial development, enhancement of rural organizations including self-help financial support, and improvement of agriculture resource-based development.

Key words : *development paradigm, metamorphosis, peasant definition, empowerment, people's economic concept*

ABSTRAK

Penerapan paradigma modernisasi yang mengutamakan prinsip efisiensi dalam pembangunan pertanian menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat petani di pedesaan. Perubahan terkait struktur pemilikan lahan pertanian, sehingga terjadi petani lapisan atas dan petani lapisan bawah. 4 dimensi pokok dalam mendefinisikan "peasant", yang secara diametral tidak berbeda dan saling menyempurnakan, sehingga perlu kajian perubahan pola hubungan, interaksi, institusi yang dialami oleh masyarakat petani di sepanjang sejarah. Dampak serius pelaksanaan sistem pembangunan terhadap kehidupan petani hendaknya untuk mengkaji *kemungkinan* dan *potensi pemberdayaan* petani. Tujuannya agar dapat *beradaptasi* dan *berkelanjutan* "tanpa" harus "kehilangan" norma, nilai dan jiwa *indigenous knowledge*. Ekonomi Kerakyatan merupakan suatu gagasan perekonomian yang mencoba merumuskan dasar interpretasi serta cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Pertimbangan ekonomi kerakyatan dan efisiensi menjadi dasar pemberdayaan petani demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Perlu revitalisasi paradigma pembangunan pertanian menjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petani serta pembangunan pedesaan, melalui: partisipasi aktif sebagai pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan; pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); pemerataan dan peningkatan penguasaan lahan dan asset produktif per tenaga kerja pertanian; teknologi; pembiayaan; pengembangan kelembagaan pertanian-pedesaan dan lembaga keuangan pedesaan yang mandiri, serta pengembangan basis sumberdaya pertanian.

Kata kunci : *paradigma pembangunan, metamorphosis, definisi petani, pemberdayaan, konsep ekonomi kerakyatan.*

PENDAHULUAN

Penerapan paradigma modernisasi yang mengutamakan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat petani di pedesaan. Berbagai proses pelaksanaan pembangunan, terutama industrialisasi, dalam jangka menengah dan panjang menyebabkan terjadinya perubahan struktur pemilikan lahan pertanian, pola hubungan kerja dan struktur kesempatan kerja, serta struktur pendapatan petani di pedesaan. Terkait dengan struktur pemilikan lahan, perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya: (1) Petani lapisan atas; merupakan petani yang akses pada sumberdaya lahan, kapital, mampu merespon teknologi dan pasar dengan baik, serta memiliki peluang berproduksi yang berorientasi keuntungan; dan (2) Petani lapisan bawah; sebagai golongan mayoritas di pedesaan yang merupakan petani yang relatif miskin (dari segi lahan dan kapital), hanya memiliki faktor produksi tenaga kerja. Untuk memenuhi kebutuhan berproduksi, kedua lapisan masyarakat petani tersebut terlibat dalam hubungan kerja yang kurang seimbang.

Lebih seabad lamanya struktur masyarakat pertanian Indonesia dalam kondisi sangat timpang. Lebih 80 persen petani berlahan kurang dari 1 ha per-KK. Lebih dari 50 persen jumlah petani berlahan sempit ini, menguasai hanya 21 persen dari keseluruhan lahan pertanian. Sementara itu sekitar 20 persen sisanya, menguasai lebih dari 50 persen keseluruhan lahan pertanian (petani berlahan luas) (Husken dan White, 1989; Sensus Pertanian, 2000). Menilik sejarah perkembangannya, di Indonesia telah terjadi pergeseran pola pengusahaan lahan ke arah yang lebih intensif sebagai imbas adopsi teknologi di bidang pertanian, yang relatif berbeda antar agro-ekosistem, jenis komoditas, dan wilayah.

Terjadi penyusutan lahan pertanian produktif akibat pesatnya perkembangan pembangunan di berbagai sektor ekonomi yang menuntut ketersediaan lahan dan sarana prasarana yang memadai. Kondisi ini terutama terjadi di Jawa, dimana Sumaryanto *et al.* (1994), mengestimasi rata-rata 23.100 hektar per tahun lahan di Jawa terkonsversi ke penggunaan di luar pertanian. Gejala marjina-

lisasi petani dan kemunduran perekonomian pedesaan menjadi sulit dielakkan.

Distribusi pemilikan dan pengusahaan lahan yang diindikasikan mengalami polarisasi di antaranya di kemukakan Saptana *et al.* (2003). Status petani didominasi oleh pemilik penggarap (39,7%-55,3%), penggarap (26,1%-31%), dan pemilik (18,6%-29,2%) (kasus di Kabupaten Indramayu). Juga ditemukan fenomena terjadinya ketimpangan struktur penguasaan lahan (kasus lahan irigasi teknis di Desa Limpas, Kecamatan Anjatan), dimana 60 persen dari sekitar 455 ha lahan sawah dikuasai oleh satu keluarga (7 KK bersaudara).

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan memahami fenomena metamorphosis petani melalui pemberdayaannya sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat petani di pedesaan yang terpinggirkan. Pemahaman dilakukan melalui deskripsi berbagai konsep perubahan arti/bentuk (metamorphosis) petani, pemberdayaan dan yang terkait dengan ekonomi kerakyatan. Di samping itu dilakukan pengkajian deskriptif berbagai bentuk pengaruh ekonomi kapitalis yang sangat berbeda terhadap suatu konsep ekonomi kerakyatan itu sendiri. Terdapatnya *link* ("benang merah") di antara berbagai konsep tersebut secara sosiologis diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengkaji dan menyusun program kebijakan pembangunan, khususnya sektor pertanian di pedesaan.

DINAMIKA DAN ENTITAS SOSIAL PETANI YANG KHAS

Dalam proses pembangunan pertanian (seperti *revolusi hijau*), dalam konteks sosiologi pedesaan, petani sebagai "wong cilik" malah sesungguhnya tidak terlibat, karena revolusi hijau justru 'meninggalkan' kaum petani. Dengan pendekatan teori dependensi, terbukti bahwa telah terjadi proses ketergantungan petani terhadap pupuk sebagai dampak dari program pemupukan intensif dan pemakaian bibit unggul dalam program Bimas, Insus sampai Supra-Insus, sehingga terjadi penurunan (keterbelakangan) penghasilan petani. Dalam hal ini, bisa jadi petani hanya merupakan korban pembangunan pertanian tersebut.

Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa di sisi lain, terdapat berbagai dampak positif revolusi hijau, dimana program tersebut setidaknya berusaha melibatkan petani kecil yang diupayakan agar mampu mengadopsi berbagai program pembangunan pertanian. Bahkan proporsi terdasar yang hendak dijangkau adalah petani dengan luasan lahan < 0,5 ha. Sajogyo (1993) menegaskan bahwa pembangunan pertanian yang dilaksanakan pemerintah salah satunya mampu membawa hasil swasembada beras bagi negara Indonesia pada tahun 1984. Dikemukakan pula bahwa, terjadinya ketimpangan penguasaan lahan dan pendapatan salah satunya lebih dikarenakan perbedaan akses antar golongan petani terhadap modal dan teknologi (terkait kemampuan SDM antar wilayah/lokasi).

Sementara itu, proses polarisasi yang sangat cepat yang dialami masyarakat petani disebut White sebagai proses eksploitasi (penghisapan) dari golongan kapitalis terhadap masyarakat di bawahnya. Petani, dari segi ekonomi, dilihat berdasarkan kemampuan mereka untuk dapat menghasilkan pendapatan berdasarkan sekian liter beras. Dari segi struktur sosial, petani merupakan kelompok masyarakat dengan klasifikasi paling bawah, seperti juga halnya para nelayan. Hal ini turut dipacu oleh pertumbuhan populasi (angkatan kerja, migrasi) dan perkembangan teknologi, akhirnya menempatkan kaum petani pada posisi yang lemah. Penetrasi ekonomi kapitalis ke pedesaan berupa penerapan teknologi modern dan sistem pasar yang mengutamakan efisien serta perubahan nilai ekonomi lahan, menyebabkan tingginya konversi tanah dari pertanian ke non-pertanian. Hal ini mengakibatkan hilangnya kesempatan bertani bagi sebagian besar buruh tani, serta semakin longgarnya ikatan-ikatan sosial yang terjalin dalam masyarakat pedesaan. Dampak sosiologis lain ekonomi kapitalis tersebut mempengaruhi tujuan produksi petani, strategi, nilai dan norma, serta orientasi hidup, bahkan kemungkinan untuk terjadinya proses *depeasantisasi* akibat makin merebaknya iklim konsumtif yang merambah hingga ke pedesaan.

Berbagai perubahan yang muncul setidaknya menunjukkan keterkaitan petani dengan globalisasi sistem ekonomi dunia, sebagai akibat proses adaptasi ketika mereka terintegrasi dalam sistem ekonomi global, serta

mempengaruhi sistem ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini juga mencerminkan perubahan sosial petani yang masih dinaungi dimensi struktural.

METAMORPHOSIS: DIMENSI DAN PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL PETANI

Petani di Indonesia mayoritas merupakan petani kecil dengan penguasaan dan penguasaan lahan yang relatif sempit (< 0,25 ha). Keterbatasan tersebut pada dasarnya bercirikan antara lain: (1) sangat terbatasnya penguasaan terhadap sumberdaya; (2) sangat menggantungkan hidupnya pada usahatani; (3) tingkat pendidikan yang relatif rendah; dan (4) secara ekonomi, mereka tergolong miskin (Singh, 2002). Sebagai masyarakat mayoritas yang hidup di pedesaan, petani merupakan masyarakat yang tidak primitif, tidak pula modern. Masyarakat petani berada di pertengahan jalan antara suku-bangsa primitif (*tribe*) dan masyarakat industri. Mereka terbentuk sebagai pola-pola dari suatu infrastruktur masyarakat yang tidak bisa dihapus begitu saja. Dari perjalanan sejarah, kaum petani pedesaan (*peasantry*) memiliki arti penting karena di atas puing-puing merekalah masyarakat industri dibangun. Mereka mendiami bagian "yang terbelakang" (di masa kini) dari bumi ini.

Oleh sejumlah penulis, masyarakat petani di pedesaan dipandang sebagai fenomena (yang jelek) dan memperlakukannya sebagai agregat-agregat tanpa bentuk, tanpa struktur, masyarakat tradisional, serta men-cap mereka sebagai manusia-manusia yang 'terikat tradisi' (kebalikan dari 'modern'). Masyarakat luar desa, pertama-tama memandang kaum petani pedesaan sebagai satu sumber tenaga kerja dan barang yang dapat menambah kekuasaannya (*fund of power*). Padahal kenyataannya, petani juga merupakan pelaku ekonomi (*economic agent*) dan kepala rumah tangga; dimana tanahnya merupakan 'satu unit ekonomi dan rumah tangga' (Wolf, 1985).

Sajogyo mengartikan masyarakat petani sebagai masyarakat tradisional. Konteks ini hendaknya dinilai bukan semata-mata sebagai 'sumberdaya peng-usahatani-an' atau 'buruh tani' yang punya 'nilai tukar', penghasil 'nilai tambah', tetapi seharusnya diakui

sebagai manusia, yang berpeluang untuk mendidik diri ('rekayasa' diartikan sebagai upaya membina hak-hak azasi manusia). Sistem ekonominya disebut "sistem usahatani keluarga". Petani tidak homogen, melainkan ada yang kaya, menengah, gurem, serta bersifat dinamis. Menurut Scott, sedikitnya empat ciri utama dalam masyarakat petani, yaitu: (1) satuan rumahtangga (keluarga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat yang berdimensi ganda; (2) petani hidup dari usahatani dengan mengolah tanah; (3) pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas; dan (4) petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat sebagai "wong cilik" (orang kecil) terhadap level masyarakat di atas desa (Scott, 1993).

Pada masa kini petani merupakan masyarakat yang memiliki kemampuan mengadopsi perkembangan teknologi pertanian. Hal ini terlihat pada perkembangan agribisnis komoditi pertanian, seperti hortikultura, perkebunan rakyat (kopi, coklat, panili, dan lain-lain), dan peternakan komersial salah satunya melalui program *integrated farming system*. Keadaan tersebut dicapai berkat perkembangan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung makin terbukanya akses petani terhadap teknologi pertanian dan kebutuhan pasar modern. Akses petani di pedesaan juga sudah terbuka melalui perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang sudah mencapai pelosok pedesaan.

Ave mengemukakan pengertian petani dari sisi mata pencaharian (Wolf, 1985). Pada awalnya manusia memulai mata pencaharian dari meramu dan berburu, yang berubah menjadi peladangan berpindah, kemudian menjadi daerah peladangan menetap. Daerah

ini kemudian berkembang menjadi daerah pertanian dengan menggunakan peralatan sederhana. Akhirnya, dengan berkembangnya sistem pengairan (irigasi) dan teknologi di bidang pertanian, berkembang kehidupan sosial bermasyarakat dan membentuk suatu lingkungan hidup, meningkatkan intensitas hidup dan berinteraksi di antara masyarakatnya.

Sementara itu, Poerwadarminta (1985) mendefinisikan petani sebagai orang yang bermatapencaharian dengan bercocok tanam di tanah. Wolf (1985), mengkaji petani secara antropologis atau historis, dari manusia primitif hingga menjadi petani modern. Berdasarkan pemikiran dari berbagai ahli, perbandingan metamorphosis petani dikemukakan pada Tabel 1.

Pada era globalisasi, perbandingan masyarakat petani primitif/tradisional, semi komersial atau komersial (modern) tidak lagi ditentukan oleh jenis pekerjaan/mata pencahariannya semata, melainkan lebih ditentukan kualitas sumberdaya manusianya. Kualitas ini dapat dikaji antara lain melalui: (1) sejauh mana visi dan misi kehidupannya di masa kini dan masa mendatang; serta (2) investasi di bidang pangan, gizi, dan kesehatan, serta investasi di bidang pendidikan. Namun pada dasarnya, dunia petani merupakan satu dunia yang teratur, yang memiliki bentuk-bentuk organisasi yang khas meskipun tidak tampak dari tingkat atas tatanan sosial. Dunia mereka bukanlah *amorphous* (tanpa bentuk) yang seolah hanya ruang kosong, yang hanya membutuhkan masukan modal industri dan ketrampilan untuk dapat membuatnya bergerak.

Chayanov menjelaskan karakteristik fundamental pertama dari ekonomi usahatani (*farm economy*) petani yang merupakan suatu

Tabel 1. Perbandingan Masyarakat Primitif; Petani, dan Petani Modern

Primitif (<i>Tribe</i>)	Petani (<i>Peasant</i>)	Petani Modern (<i>Farmer</i>)
Bertani berpindah	Bertani tetap	Rumah kaca
Kebutuhan primer dan kerabat	Subsisten	Keuntungan maksimum
Ada ikatan dengan tetangga	Ada ikatan nilai-nilai	Hubungan longgar dalam simbol
Surplus diserahkan ke golongan	Surplus diserahkan ke penguasa	Surplus sebagai keuntungan
Intensitas hubungan.dengan luar rendah	Intensitas hub.dengan luar tinggi	Mobilitas tinggi
Belum ada spesialisasi	Semi spesialisasi atau campuran	Spesialisasi/profesional
Belum ada sewa tanah	Sudah ada sewa tanah.	Cenderung sewa

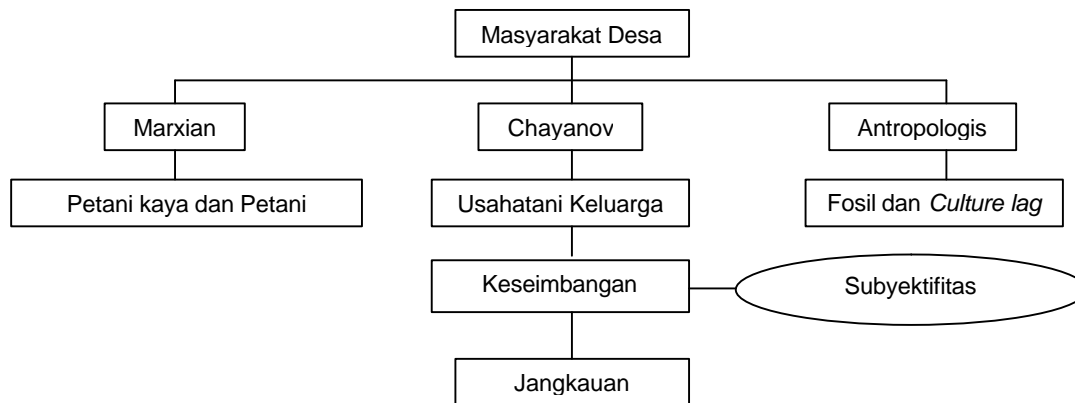
Sumber: Direduksi dari Sahlins (1960) dan Malinowski (1922).

perekonomian keluarga (*family economy*) (Wiradi, 1993). Dalam perekonomian petani dinyatakan unsur-unsur biaya produksi tidak dapat diperbandingkan dengan yang terdapat dalam perekonomian kapitalis. Oleh karena itu, cara penghitungan laba tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada perekonomian petani. Masalah petani adalah fakta yang menarik, sebab mencari keseimbangan antara tuntutan dunia luar dan kebutuhan petani akan berlangsung selamanya; dimana hasil yang mereka peroleh adalah dari seluruh tahun kerja, bukan dari hari kerja (unit kerja).

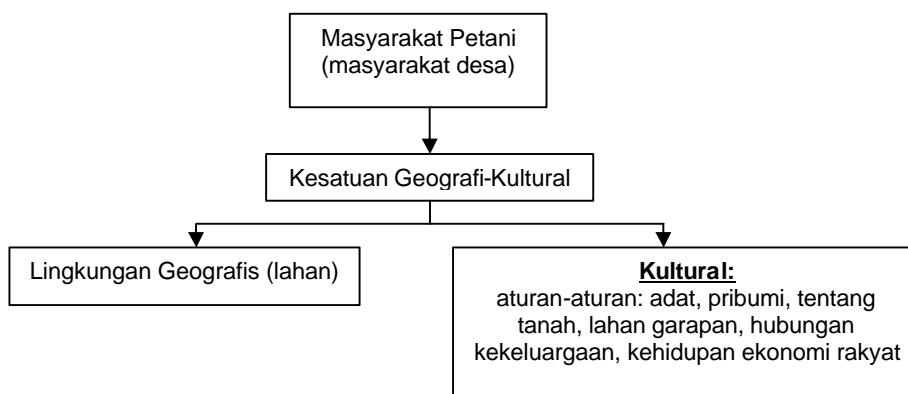
Mencermati Gambar 1, aliran Marxian melihat akses perekonomian dan pemilihan sumberdaya petani dengan mengategorikan atas petani kaya dan petani miskin. Aliran antropologis mengkaji masyarakat petani dari sisa-sisa peninggalan dan keterbelakangan kebudayaannya. Chayanov mengkaji perkem-

bangun masyarakat petani dengan usahatani keluarga, subyektifitas garapan terhadap keseimbangan perekonomian petani, dan jangkauan petani yang makin terbuka terhadap berbagai akses pembangunan.

Sementara itu, Van Vollenhoven (Gambar 2) menggambarkan masyarakat petani sebagai masyarakat desa yang dilatarbelakangi kesatuan agroekosistem (alam/geografi) dan kebudayaan. Kesatuan lingkungan geografisnya terutama terkait dengan penguasaan dan pengusahaan sumberdaya lahan. Sedangkan kesatuan kebudayaan (kultural) meliputi berbagai aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat petani tersebut. Berbagai aturan tersebut antara lain meliputi aturan adat, penduduk asli, tanah, lahan garapan, hubungan kekeluargaan, dan kehidupan ekonomi masyarakat (rakyat) desanya.



Gambar 1. Bagan Masyarakat Petani (Chayanov)



Gambar 2. Bagan Masyarakat Petani di Desa (Van Vollenhoven)

Pembeda masyarakat petani dengan masyarakat lain adalah masyarakat sebagai entitas yang memiliki struktur dan kultur yang khas. Porak (dalam Redfield, 1982) menyebutkan beberapa ciri petani yang dianggap sama dimana saja, yaitu: keluarga adalah sebagai kelompok sosial, keterikatan mistik terhadap pertanian, dan tekanan pada prokreasi. Kroeber (1982) menegaskan bahwa ciri petani tersebut bersifat "kedesaan", tetapi aktivitas kehidupan masyarakat petani berhubungan dengan pemenuhan komoditi kebutuhan bahan pangan di pasar-pasar di kota, serta menjadikannya sebagai bagian masyarakat dan budaya. Sedangkan Wolf (1982) melihat petani melalui beberapa ciri, yaitu: mereka yang memandang aktifitas pertanian sebagai sumber mata pencaharian dan cara kehidupan, bukan sebagai usaha untuk mencari keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa petani yang mengerjakan pertanian untuk penanaman modal kembali dan usaha (tanah sebagai modal dan komoditi), adalah pengusaha pertanian, bukan *peasant* (Redfield, 1982).

Handlin (1982) memandang masyarakat petani sebagai masyarakat yang memiliki kesamaan dengan tipe masyarakat lain baik di dunia Barat maupun Timur. Kesamaan tersebut dalam hal: (1) adanya ikatan pribadi dengan tanah; (2) keterikatan kepada desa atau komunitas lokal; (3) pentingnya keluarga secara sentral; (4) perkawinan sebagai persiapan kecukupan ekonomi menuju makmur; serta (5) adanya ketegangan antara keterikatan kepada tanah dan dunia lokal dengan keharusan menghasilkan tanaman penghasil uang; dan seterusnya. Dari suatu pernyataan Moore, oleh Landsberger dan Alexandrov (1981) menyimpulkan adanya 3 substansi penting, yaitu: kepemilikan tanah secara *de facto* (bagi petani, tanah tidak hanya bermakna material/ekonomi, tapi juga sosial-budaya, dimana tanah menjadi simbol terhadap status sosial-ekonomi bagi petani dalam komunitasnya); subordinasi legal (dimana kelas sosial petani berada di bawah kelas sosial tuan tanah); dan kekhususan kultural.

Sementara itu, Redfield (1982), dari hasil penelitiannya terhadap masyarakat petani Inggris, petani Yucatan sekarang dan Boetia kuno, mengemukakan terdapatnya 3 sikap/nilai yang sama pada petani, yaitu: sikap yang intim dan hormat kepada tanah; ide

bahwa pekerjaan pertanian adalah baik dan perdagangan merupakan usaha yang tidak begitu baik; dan tekanan terhadap kegiatan produktif sebagai suatu kebijakan utama.

Wolf meyakini bahwa selain kepemilikan secara *de facto*, kaum petani di pedesaan yang dicirikan oleh surplus yang dialihkan (dengan eksploitasi) kepada kelompok/para pengusaha yang dominan, yang umumnya tidak melakukan pengusahaan (proses produksi) langsung. Bahari (dalam: Wiradi, 2002) menilai pernyataan Wolf dan Moore, sebagai menekankan adanya relasi sosial dalam aspek ekonomi kaum petani pedesaan dengan sistem di luar komunitasnya; dimana makna petani bukan hanya sebagai komunitas tertutup (eksklusif) atau terisolasi, melainkan berinteraksi dengan pihak luar. Apalagi perkembangan teknologi di masa sekarang yang telah membuat akses ke luar daerah semakin terbuka dan tidak lagi bersifat otonom. Dengan demikian, para petani yang hidup dan bermukim di desa dimungkinkan untuk dapat tinggal di luar desanya (migrasi).

Pengkajian mengenai petani, tidak lagi terbatas hanya dalam lingkupnya sebagai komunitas petani dengan tanah (pertanian) dan tenaga kerja sebagai faktor produksi belaka. Meluasnya cakupan pembahasan petani sehingga nelayan dan peternak termasuk dan dianggap pula sebagai *peasant society*. Perbedaannya terletak pada ekologi ekosistem tempat petani berusaha, sehingga terdapat perbedaan bentuk dan pola hubungan dan interaksi, namun tidak berbeda jauh dengan realitas sosial dari aspek struktur sosial dan nilai kultural. Dalam komunitas nelayan dan peternak, juga terdapat pola hubungan patron-klien, nilai subsistensi dan subordinasi kelas (Wiradi, 2002).

Koentjaraningrat (1997) meninjau dinamika masyarakat petani dan mengakui terdapatnya berbagai tipe masyarakat yang hidup di desa terpencil, yaitu: (1) sebagai masyarakat dengan struktur sosial yang sangat sederhana, hidup dari kebun ubi dan keladi yang dikombinasikan dengan berburu dan meramu (ada pengaruh zending Kristen); (2) masyarakat yang hidup dalam desa yang berhubungan dengan kota kecil yang dibangun kolonial Belanda, yang agak kompleks, hidup dari bercocok tanam padi di ladang atau sawah (missi dan zending Kristen); (3) petani

yang hidup dari bercocok tanam padi di sawah atau ladang, berhubungan dengan kota kecil yang pernah jadi pusat pemerintahan kolonial Belanda (pengaruh budaya Islam mulai kuat); (4) petani yang hidup dari bercocok tanam padi di sawah, yang berhubungan dengan kota bekas pusat kerajaan pribumi dan administrasi Belanda (pengaruh Hindu Islam dan Kolonial Belanda); (5) masyarakat perkotaan yang berperan sebagai pusat pemerintahan dimana sektor industri masih disebut tipe masyarakat dan kebudayaan kota kecil; dan (6) masyarakat dan kebudayaan kota metropolitan dimana sektor industri sudah maju.

Menurut Kroeber (dalam: Marzali, 2003), peysan (*peasant*) adalah masyarakat pedesaan, hidup berhubungan dengan kota dekat pasar (seperti telah dikemukakan sebelumnya). Posisi petani peysan dalam perkembangan sosio-kulturalnya, adalah: (1) berada di antara masyarakat modern dan primitif; (2) bersama dengan masyarakat primitif dan petani farmer; masyarakat yang hidup menetap dalam komunitas pedesaan; (3) dari sudut perkembangan *mode of production*, berada pada tahap transisi antara petani primitif dan petani farmer. Selain pemikiran di atas, menurut konsep *peasant* (Marzali, 2003), terdapat tiga golongan berbeda, yaitu: (1) sebagai seluruh penduduk desa (termasuk petani, buruh, jasa, PNS, pedagang dan lainnya); (2) mengacu hanya ke petani saja (termasuk petani-penggarap); dan (3) buruh tani yang menjadi kuli pada petani lain (tidak punya garapan). Peysan (*peasant*), adalah suatu tipe ideal, yang digambarkan sebagai golongan individu bercirikan khas secara sosial, kultural, ekonomis dan politis.

Dengan demikian, dari pada memperdebatkan "ada"nya (tetapi "tidak") upaya memahami definisi maupun metamorphosis petani, serta berandai-andai apa sebaiknya terjadi (namun tidak terjadi), maka sebaiknya para pembuat kebijakan berupaya mempelajari beragam pemikiran tersebut untuk memahami perilaku petani ("*peasant*"). Upaya ini terkait dengan terjadinya berbagai proses perubahan, seperti proses "*peasant*" menjadi "*farmer*" sebagai ciri terjadinya proses modernisasi. Dari berbagai teori dan kasus kajian, Kurtz (2000) menemukan empat dimensi pokok dalam definisi "*peasant*", yaitu:

- (1) Petani sebagai *rural cultivators* ("pengolah tanah di pedesaan"). Menurut Popkin, "pilihan rasional" berlaku bagi "peasant" tanpa membedakannya dari "petani lain".
- (2) Dimensi "komunitas petani", bercirikan petani yang jelas dan membedakannya dari pola budaya "urban". Cenderung diacu para antropolog (contoh: Redfield).
- (3) Petani yang menghidupi komunitas ter-subordinasi kuat oleh sesuatu kekuasaan luar. Digagas oleh pakar pengembang teori "ekonomi moral" (contoh: Scott).
- (4) Petani merupakan kombinasi yang berbeda dari ketiga dimensi di atas, yaitu sebagai "rural cultivators", komunitas ter-subordinasi, dan penguasaan/pemilikan. (contoh: Wolf, salah seorang pengikut teori Marx).
- (5) Mengacu pada empat dimensi arti "peasant" sekaligus, yang mengikuti telaan Weber (contoh: Moore), namun sangat jarang diacu oleh pakar antropolog.

Dengan membandingkan berbagai alur pikiran para pakar tersebut, Kurtz menyimpulkan bahwa berbagai implikasi masuknya pasar dan negara ke dalam komunitas pre-kapitalis dijelaskan oleh teori "ekonomi moral". Teori ekonomi politik (Popkin) adalah mengenai para pelaku ekonomi yang bergerak dalam konteks organisasi pasar yang sudah dominan. Artinya, pendekatan "ekonomi moral" dan "ekonomi politik" bisa sama-sama benarnya. Tuntutan memperluas sistem "ekonomi politik" adalah bagaimana lapisan bawah dan golongan belum terjangkau dapat terakomodasi dan terjangkau seluruhnya; dimana semua pihak yang mewakili dapat tampil bersamaan.

Terkait hal tersebut, diketahui bahwasanya terdapat tiga pilar yang menopang kehidupan masyarakat dan kelembagaan perekonomian rakyat di pedesaan, yaitu: (1) kelembagaan yang hidup dan telah diterima oleh komunitas lokal/tradisional (*voluntary sector*); (2) kelembagaan pasar (*private sector*) sejalan dengan keterbukaan ekonomi, dan (3) kelembagaan sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*).

Sementara itu, Esman dan Uphoff (1984) dan Uphoff (1992) mengklasifikasikan kelembagaan lokal dalam beberapa kategori, yaitu: administrasi lokal; pemerintah lokal; organisasi (baca: kelembagaan) yang berang-

gotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan dan bisnis swasta yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional dan global. Etzoni (1961) mengemukakan bahwa pola keterkaitan atau keterlibatan (*compliance pattern*) merupakan basis kelembagaan karena hubungannya merupakan bagian sentral dari struktur kelembagaan (organisasi). Dikemukakannya pula terdapat tiga tipe tujuan utama dalam kelembagaan dalam menunjang perekonomian rakyat di pedesaan, yaitu: tujuan perintah (*order*), *economic* dan *culture* (budaya), dan adanya tujuan politik (*political goals*).

Berbagai pengertian yang dikemukakan dalam upaya mendefinisikan "petani", pada dasarnya secara diametral tidak berbeda satu sama lain. Hal ini terkait dengan maksud untuk saling menyempurnakan, tergantung dari berbagai sisi dan perspektif mereka masing-masing. Kajian yang diperlukan adalah mengenai perubahan pola-pola hubungan, interaksi, institusi dan sebagainya yang dialami oleh masyarakat petani di sepanjang sejarah.

Adalah suatu keniscayaan bahwa peluang dan kesempatan bertani sebagai sumber nafkah rumah tangga petani menjadi berkurang bahkan menghilang sebagai konsekuensi sistem pembangunan di era modernisasi. Dampak serius pelaksanaan sistem pembangunan tersebut terhadap kehidupan petani (*peasant*) di pedesaan hendaknya digunakan untuk mengkaji kemungkinan dan potensi pemberdayaan petani. Tujuannya agar dapat beradaptasi dan berkelanjutan tanpa harus kehilangan norma-norma dan nilai-nilai pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang menjiwainya.

PEMBERDAYAAN: TERKAIT DENGAN POTENSI SUMBER PENDAPATAN DI PEDESAAN

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan istilah yang semakin populer dan sering digunakan oleh perancang kebijakan dan pelaku pembangunan, terutama setelah era 1990-an. Sebelumnya, istilah partisipasi masyarakat yang lebih banyak digunakan dalam jargon pembangunan. Namun, istilah ini mulai ditinggalkan karena lebih bernuansa sentralistik dan kurang mampu memperbaiki makna

powerless masyarakat kecil (petani). Istilah partisipasi masyarakat mulai ditinggalkan juga disebabkan karena arahnya bukan untuk pengadvokasian *power structure*, yang umumnya timpang dan kurang memihak kepentingan petani. Sementara itu, penggunaan istilah *empowerment* lebih terkait dengan penguatan terhadap ketidakberdayaan masyarakat (misalnya kemiskinan). Masyarakat diberdayakan dengan memanfaatkan pengetahuan dan kearifan lokal (*indigenous knowledge*), agar menjadi subyek dalam pembangunan, mampu menolong dirinya sendiri, mandiri, serta mengembangkan semangat *self-reliance* setempat.

Makna pemberdayaan mencakup tiga aspek, yaitu: menciptakan kondisi yang kondusif yang mampu mengembangkan potensi masyarakat setempat, memperkuat modal (potensi) sosial masyarakat demi meningkatkan mutu kehidupannya, dan mencegah dan melindungi agar kekuatan atau tingkat kehidupan masyarakat yang sudah rendah menjadi semakin rendah (Sumodiningrat, 1997).

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah serangkaian upaya strategi dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap sumberdaya pembangunan melalui penciptaan peluang yang seluas-luasnya agar masyarakat lapisan bawah (baca: masyarakat pedesaan) mampu berpartisipasi. Pemberdayaan juga merupakan upaya peningkatan pedesaan sehingga mampu berpartisipasi. Pemberdayaan juga merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat (berkaitan dengan pemanfaatan otonomi daerah) agar mampu mengakses proses pembangunan untuk mendorong kemandirian yang berkelanjutan (tanggap dan kritis terhadap perubahan) serta mampu berperan aktif dalam menentukan nasibnya sendiri. (Sumodiningrat, 1999).

Kebijakan pemberdayaan petani dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu: *Pertama*: Kebijakan langsung (sering disebut sebagai tujuan praktis), diarahkan pada peningkatan akses terhadap sasaran pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan bahan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan. Ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan nilai tambah, perbaikan akses sumberdaya, teknologi, pasar, dan sumber pembiayaan; *Kedua*: Kebijakan tidak langsung; diarahkan pada

penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan, pemberdayaan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; *Ketiga*: Kebijakan khusus; ditujukan pada penyiapan penduduk miskin untuk melakukan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan upaya menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan suatu potensi dapat berkembang dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki tersebut. Selain itu, juga diperlukan upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan membuka atau menciptakan aksesibilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya. Lebih lanjut, diperlukan tindakan perlindungan terhadap potensi yang ada sebagai bukti keberpihakan yang mencegah dan membatasi persaingan yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasi terhadap yang lemah oleh yang kuat. Pada akhirnya, diharapkan bahwa pemberdayaan tidak membuat masyarakat semakin tergantung pada program bantuan, melainkan berusaha dan menikmati hasil dari usaha sendiri.

Peran pemberdayaan petani sebagai pendukung keterjaminan sosial ekonomi rumahtangga hendaknya dapat menjamin penghasilan dan stabilitas pendapatan para petani. Pemberdayaan masyarakat tradisional (petani) berawal dari bentuk struktur sosial yang secara linier berubah menjadi struktur yang lebih bersifat ekonomi, dimana kedua yang saling berkait. Sifat sosial sering kali menguatkan tujuan perekonomian keluarga dengan memberi kesepakatan yang lebih berpihak pada anggota kelembagaan yang berstatus berkekurangan (*powerless*).

Dengan demikian, pemberdayaan petani merupakan upaya yang dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) mereka, terutama keterjaminan peluang berusaha dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan rumahtangga di pedesaan. Perkembangan sistem pertanian, kecuali mekanisasi pertanian, secara umum berbanding lurus dengan kontinuitas kesempatan berusaha di pedesaan.

Berkembangnya beragam usahatani komoditas hortikultura, misalnya, membuka peluang berusaha sepanjang tahun. Perbaikan harga komoditas pertanian pada sistem pemasaran akan mempengaruhi struktur biaya dalam proses produksi. Di samping dapat memberikan jaminan perolehan pendapatan, khususnya bagi rumahtangga petani yang kurang mampu, pemberdayaan petani juga membangun jaringan sosial ekonomi para petani melalui komunikasi yang intensif dan komunikatif antar petani. Melalui komunikasi yang intensif, dapat menjadi media yang sangat fungsional dalam membahas berbagai aspek kehidupan pedesaan, terutama yang memiliki kontribusi bagi keamanan dan ketenangan rumahtangga masyarakat lapisan bawah. Meski demikian, tidak dipungkiri terdapatnya beberapa kendala yang menghambat aktivitas pemberdayaan tersebut terutama dari segi manfaat ekonomi.

Pemberdayaan petani dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang tinggi bagi berbagai golongan masyarakat, dapat memberi informasi aktual tentang pasar input-output, diperoleh jaminan perusahaan usahatani bersama, meningkatkan posisi tawar petani dalam berburuh, memperluas jaringan usaha terutama bagi buruh tani, dan memiliki aturan yang menegakkan disiplin pola tanam dan mutu panen sebagai modal penting dalam merebut pasar output (produksi).

Faktor pendukung dalam upaya memberdayakan petani meliputi: (1) kekuatan solidaritas petani sebagai konsekuensi lahir dan terbentuk dari masyarakat di pedesaan, (2) struktur dan aturan main merupakan produk konstruksi petani itu sendiri sehingga ditaati, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat petani maupun komunitasnya, (3) sifatnya yang informal dengan struktur sederhana dan sebagian besar mekanisme yang berlaku mengarah pada keputusan keadilan dan bukan persaingan, (4) persepsi yang baik dari petani maupun buruh tani terhadap kedudukan dan peran usahatani, (5) partisipasi para petani yang tinggi, dan (6) memiliki kemampuan beradaptasi terhadap agroekosistem setempat, mekanisme pembangunan yang diterapkan, maupun dinamikanya dalam mensiasati kemungkinan eksploitasi oleh petani lapisan atas.

Penciptaan iklim kondusif meliputi: (1) memperbaiki sistem dan mekanisme pemasaran komoditas khususnya peningkatan harga jual di tingkat petani; (2) secara sosial diperlukan perubahan persepsi terhadap pekerjaan pertanian agar nilai kerjanya tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan alternatif terakhir karena kurang terhormat dan tidak mampu mengangkat status kehidupan dalam masyarakat; (3) pengadopsian paket teknologi dilakukan secara selektif agar tidak memudarkan peran petani dan menghilangkan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang terkadang lebih potensial dalam menjaga kelestarian lingkungan maupun kekayaan nilai-nilai lokal.

Dalam penciptaan iklim yang menunjang pemberdayaan petani terkait dengan sumber mata pencaharian, diperlukan beberapa upaya konkrit, seperti melibatkan kembali peran tokoh informal dalam kegiatan penggalangan SDM petani secara sosial dan ekonomi; melibatkan tokoh agama dalam membangun etos kerja dan strategi hidup produktif dan hemat; memberikan pelatihan/peningkatan kemampuan SDM agar dapat mengarahkan petani pada unit ekonomi yang produktif; dan melakukan pengkaderan bagi generasi (petani) muda pertanian, baik keterampilan maupun persepsi nilai kerja agar tidak terjadi putusannya generasi pekerja pertanian dalam masyarakat di pedesaan. Di samping itu secara evolutif, pengeluaran anggota rumahtangga petani berusaha lebih diefisienkan dan diarahkan dari hal-hal yang bersifat seremonial yang umumnya boros dengan mengarahkannya kepada aktivitas yang hemat waktu dan biaya. Jadi, sifat kedinamisan pemberdayaan tersebut selalu diperhatikan sebagai faktor utama dalam penyesuaian sebagai langkah menuju pencapaian keseimbangan terhadap berbagai perubahan yang akan terjadi.

PEMBERDAYAAN: TERKAIT KONSEP EKONOMI KERAKYATAN

Aliran neo-klasik yang dianut paradigma pembangunan pertanian, nyatanya kurang berhasil mencapai pertumbuhan yang adil bahkan menciptakan ketergantungan di tingkat nasional dan lokal (Korten dan Sjahrir, 1984). Campur tangan pemerintah menjadi terlalu jauh dalam proses hegemoni globalisasi dan

pemudahan pelaksanaan kontrol global yang seringkali menyingkirkan norma dan nilai sosial lokal. Strategi pemerataan pembangunan melalui *trickle down effect* terbukti sulit diimplementasikan. Hal ini karena di satu sisi sumberdaya terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat yang berkualitas dan berkuantitas ekonomi yang relatif mapan. Di sisi lain, proses pembangunan yang sarat kapital menciptakan polarisasi dimana sebagian besar peysan "terpaksa" melepaskan penguasaan sumberdaya lahan menjadi kelompok petani gurem bahkan "*landless*", buruh tani atau kelompok masyarakat miskin (Hayami & Kikuchi, 1987).

Kondisi tersebut diperburuk oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang telah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Berdasar data BPS (1998), pemerintah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (1976) menjadi 22,5 juta, namun kembali meningkat sekitar 23,8 persen menjadi 49,5 juta pada awal tahun 1999 yang ditenggarai sebagai akibat krisis tersebut.

Semakin terbukanya akses petani pada era globalisasi sebagai suatu proses perubahan akibat perkembangan teknologi dan daerah, membutuhkan perlunya strategi alternatif dalam mengatasi masalah dan dilema petani (kekurangan dari segi ekonomi/subsisten). Usaha utama mereka adalah berupaya menekan pola konsumsi yang konsumneris, dengan menyesuaikan pengeluaran dengan penghasilan, mengerahkan seluruh anggota keluarga untuk dapat menghasilkan bahan makanan dan barang kebutuhan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kaum tani selalu dinamis (tidak statis seperti yang secara klise dalam kepustakaan), bergerak terus antara dua kutub mencari pemecahan dilema pokok mereka. Keadaan ini melibatkan proses pemberdayaan sebagai adaptasi (penyesuaian) untuk menopang mereka dalam mempertahankan diri dan sesamanya, dalam suatu tatanan hidup sosial.

Sentralitas dan sifat *top down* mekanisme pembangunan yang terwujud dalam aplikasi teknologi berisi input eksternal yang menuntut modal tinggi untuk memperbaiki proses produksi dan memperbaiki produktivitas, hanya mampu diadopsi dan dinikmati petani berlahan luas (lapisan menengah dan atas). Pengaplikasian paket teknologi tersebut

berdampak luas terutama menjadi longgarnya ikatan nilai dan norma lokal yang berorientasi sosial dan bersifat komunal sebagai akibat lebih mengedepankan efisiensi ekonomi. Sementara, pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) yang ada dan berkembang di masyarakat, penerapan dan pelestariannya semakin terhambat.

Masyarakat selanjutnya jadi semakin tergantung pada nilai dan kekuatan luar desa seperti pasar dan industri perkotaan yang bersifat ekonomi dan individualis; dimana ukuran yang digunakan tidak lagi menyangkut kelestarian dan kebersamaan, melainkan eksploitasi dan sukses finansial semata. Artinya, masyarakat desa sangat rapuh terhadap faktor yang berada di luar pengendaliannya. Implikasi lain adalah memudarnya keterjaminan sumber nafkah bagi kaum tani yang selama ini eksis dan hidup di pedesaan akibat memudarnya sistem ekonomi moral yang sebenarnya; dimana etika subsistensi yang berakar dalam kebiasaan ekonomi dan pertukaran sosial tidak dapat difungsikan dalam era pembangunan modern (Scott, 1981).

Tekanan ekonomi kapitalis yang makin kuat ke pedesaan, berupa penerapan teknologi modern dan sistem pasarisasi yang mengutamakan efisiensi, bukan saja mengakibatkan makin hilangnya peluang dan kesempatan bertani sebagian besar petani, namun juga kian longgarnya norma dan nilai ikatan sosial masyarakat yang terjalin di pedesaan. Ekonomi uang menyebabkan makin lemahnya peran kelembagaan petani, yang dipandang cenderung *involutif* dengan lebih menekankan hubungan produksi dalam bentuk *resiprositas*. Namun, masih kuatnya sentimen individu dalam kelompok dan kemampuan merespon perkembangan teknologi dapat diantisipasi dengan beradaptasi terhadap kemajuan pembangunan. Di beberapa wilayah yang *traditional society*-nya masih hidup dan bertahan, hal tersebut adalah sebagai aset pembangunan yang perlu ditingkatkan tanpa menghancurkan inti budaya yang menjiwainya. Strategi tersebut juga dapat menjadi salah satu potensi yang bisa dikembangkan menjadi lembaga yang mampu mengadopsi teknologi dan berorientasi pasar, serta bermanfaat bagi mempertahankan usaha bertani dan pendapatan kaum petani.

Secara umum, keberpihakan pada ekonomi kerakyatan juga penting, tidak hanya bagi aktivitas petani tradisional secara mikro, tapi juga bagi pembangunan regional secara makro. Peningkatan aksesibilitas menjadi unsur pendukung yang sangat berperan dalam memperlancar arus informasi terhadap pusat perekonomian dan pelayanan. Keberhasilan pembangunan pertanian secara nasional dan regional secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktivitas ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan beradaptasi terhadap dinamika perekonomian secara keseluruhan.

Terlebih bila mengingat bahwa mulai tahun 1984, kebijakan pembangunan ekonomi dengan memacu pertumbuhan industri, justru meninggalkan sektor pertanian dan penuh ketergantungan pada impor. Pembangunan pertanian mulai didominasi oleh perusahaan besar terutama perkebunan, peternakan, dan perikanan, dimana melibatkan rakyat berupa PIR. Namun, krisis ekonomi 1997-1999 menyadarkan pemerintah akan berbagai kekeliruan pembangunan ekonomi nasional semenjak tahun 1984. Krisis ekonomi memposisikan sektor pertanian dan pedesaan menjadi penyelamat perekonomian nasional sebagai dampak krisis ekonomi tersebut.

Pertumbuhan sektor pertanian masih positif meskipun terjadi kontraksi yang cukup keras terhadap ekonomi nasional, disertai menurunnya produktivitas tenaga kerja, dan membengkaknya kemiskinan pedesaan. Kontribusi sektor pertanian meningkat drastis terhadap pendapatan devisa. Pembangunan ekonomi nasional harus mengoptimalkan manfaat sumberdaya domestik secara keberpihakan dan berkeadilan, dan harus melibatkan secara aktif masyarakat dalam perekonomian (ekonomi kerakyatan) disertai desentralisasi manajemen pemerintahan. Krisis ekonomi juga menumbuhkan kembali keyakinan bahwa sektor pertanian dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan nasional melalui pengembangan ekonomi kerakyatan di pedesaan.

Ekonomi Kerakyatan bukanlah suatu gagasan atau ideologi baru tentang perekonomian, namun merupakan percobaan perumusan dasar interpretasi serta cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, dalam penyusunan suatu konsep

pembangunan perlu dipahami, sedikitnya tiga pertanyaan pokok yang sangat penting untuk mengetahui kejelasan hubungan antara konsep pembangunan dan ideologi yang mendasarinya, yaitu: hal orientasi dan arah pembangunan; apakah dan siapakah yang menjadi pendorong dan pelaksana pembangunan tersebut; dan dalam suasana sosial politik yang bagaimana pembangunan tersebut diadakan.

Meski demikian, dibutuhkan interpretasi dan penerjemahan dalam suatu strategi dan program pembangunan yang lebih berfungsi dan menjamin arahnya pada cita-cita tersebut. Artinya, dana dan daya-upaya dalam strategi dan program pembangunan harus terpusat pada perbaikan nasib rakyat yang materiil dan spiritualnya masih terbelakang. Terlebih bila mengkaji bahwasanya lebih 80 persen rakyat Indonesia hidup di pedesaan, dimana hanya sekitar 10-15 persen yang merupakan golongan menengah-atas. Bahkan dari sekitar 80 persen sisanya merupakan rakyat desa serba kekurangan, 40 persennya tergolong rakyat desa sangat miskin dan miskin (Sumawinata, 2004). Sementara itu, data BPS (2004) menyebutkan bahwa sudah lebih dari 30 persen penduduk yang tinggal di daerah perkotaan.

Bukan berarti seluruh dana harus ditanamkan pada pembangunan di desa, namun pembangunan desa dan masyarakatnya (dengan beragam kebutuhan dan permasalahannya yang kompleks), harus menjadi pusat perhatian pembangunan. Untuk itu, dukungan dan bantuan pembangunan dari daerah perkotaan (terkait industrialisasi) sangat dibutuhkan sebagai penyedia kebutuhan pembangunan di pedesaan. Arti membangun bukan sekedar meningkatkan kemampuan semata, namun membangun keinginan dan kesadaran untuk bebas dari keterbelakangan, kemiskinan dan berbagai hambatan untuk maju dan berkembang.

Dengan demikian, pertimbangan ekonomi kerakyatan dan efisiensi menjadi dasar penyesuaian dalam upaya pemberdayaan petani tersebut demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga pedesaan. Untuk itu, paradigma pembangunan pertanian harus direvitalisasi menjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petani serta pembangunan pedesaan. Oleh karenanya, perlu dilakukan revitalisasi kebijakan pemba-

ngunan pertanian baru, antara lain melalui partisipasi aktif sebagai pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan, pengembangan SDM, peningkatan penguasaan lahan dan aset produktif. Selain itu juga perlu pemerataan pemilikan pada aset produktif pertanian, teknologi, dan pembiayaan. Dengan strategi ini, pertanian akan menjadi basis pertumbuhan ekonomi Indonesia masa depan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Indonesia memiliki potensi SDA dan SDM yang besar. Potensi SDA dikombinasikan dengan hak penguasaan lahan dan SDM yang berkualitas, sehingga SDA tersebut mampu dikelola dengan baik melalui penerapan teknologi maju, guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat petani. Tekanan ekonomi kapitalis ke pedesaan, berupa penerapan teknologi modern dan sistem pasar yang mengutamakan efisiensi, bukan saja mengakibatkan hilangnya kesempatan berusaha bagi petani, namun juga makin longgar dan melemahnya ikatan sosial yang terjalin dalam masyarakat di pedesaan. Diperlukan revitalisasi melalui peningkatan peran (pemberdayaan) petani sebagai aset pembangunan. Hal ini perlu diarahkan pada proses efisiensi usahatani guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, pemerataan akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi (lahan dan modal) dan jaringan pasar, serta bertumpu pada keseimbangan ekologi sehingga dapat berkelanjutan.

Kemampuan petani dalam merespon perkembangan teknologi dan beradaptasi dengan kemajuan pembangunan perkonomian yang ada perlu ditingkatkan tanpa mengancurkan norma dan nilai serta inti budaya yang menjiwalkannya. Hal ini bukan saja berguna untuk meningkatkan produksi dan produktivitas petani tapi juga bermanfaat bagi peningkatan pendapatan buruh tani yang sebagian besarnya merupakan masyarakat miskin. Konteks ini memungkinkan kebijakan makro tingkat nasional yang lebih tepat yang dapat membantu mengatasi keterbatasan petani, serta memungkinkan mengembangkan kerangka institusional yang dapat mengaitkan teknologi "tepat guna" dengan petani secara sistem interaktif atas kekuatan sendiri. Pola pember-

dayaan masyarakat petani melalui sekolah lapang seperti SLPHT, pelatihan ke luar negeri (Jepang) dapat terus dilakukan dengan beberapa penyempurnaan.

Masalah keterbatasan petani yang menjadi penyebab kemiskinan lebih merupakan kondisi struktural sehingga diperlukan perubahan struktural untuk mengatasinya. Agenda reforma agraria dan program-program pembiayaan pertanian yang mudah diakses petani. Secara bertahap diperlukan perubahan persepsi terhadap pekerjaan sektor pertanian yang dipandang sebagai pekerjaan kurang terhormat dan alternatif terakhir. Adopsi teknologi modern yang dilakukan secara selektif seperti pola tanam yang mengikutsertakan komoditas hortikultura, pengembangan kebun buah-buahan (*fruits estate*), dan pengembangan pertanian organik, diharapkan dapat merubah persepsi buruk pertanian.

Pemberdayaan petani merupakan upaya menciptakan iklim (suasana) kondusif, untuk membangkitkan kesadaran berkembangnya potensi yang dimiliki dengan mendorong, memotivasi, menciptakan/membuka aksesibilitas berbagai peluang, mengurangi atau bahkan menghilangkan intervensi dan dominasi pemerintah terhadap perbaikan sistem dan mekanisme pemasaran komoditas. Ekonomi Kerakyatan merupakan suatu gagasan atau ideologi baru tentang perekonomian yang mencoba merumuskan dasar interpretasi serta cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Pertimbangan ekonomi kerakyatan dan efisiensi menjadi dasar penyesuaian dalam upaya pemberdayaan petani demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga di pedesaan.

Perlu dilakukan revitalisasi paradigma dan kebijakan pembangunan pertanian baru dari pendekatan SDA dan teknologi ke arah pembangunan pertanian yang lebih holistik (SDA, SDM, teknologi dan kelembagaan) melalui partisipasi aktif sebagai pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan, pengembangan SDM, peningkatan penguasaan lahan dan asset produktif, pemerataan dan peningkatan pemilikan asset produktif pertanian, teknologi, pembiayaan, pengembangan pertanian-pedesaan dan lembaga keuangan pedesaan yang mandiri, serta pengembangan basis sumberdaya pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, S. 2002. Petani dalam Perspektif Moral Ekonomi dan Politik Ekonomi; *dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan W.* (2002). Akatiga Bandung.
- Chambers, R. 1987. *Pembangunan Desa. Mulai dari Belakang.* LP3ES. Jakarta.
- Elisabeth, Roosganda dan V. Darwis. 2003. Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya terhadap Program Jaring Pengaman Sosial. *Jurnal SOCA*, Vol.3. No.2. Juli 2003. Universitas Udayana. Bali.
- Elisabeth, Roosganda. 2005. Restrukturisasi Ketenagakerjaan dalam Proses Modernisasi Berdampak Perubahan Sosial pada Masyarakat Petani. *Jurnal SOCA* Vol.6. No. 1: 13-20. Universitas Udayana. Bali.
- Etzoni, A. 1985. *Organisasi-Organisasi Modern.* UI. Press & Pustaka Bradjaguna. Jakarta.
- Hadiz, V. R. and Daniel D. (eds). 2005. *Social Science and Power in Indonesia.* Equinox Publishing. Jakarta Singapore. ISEAS.
- Hayami, Y. dan M. Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa.* Obor. Jakarta.
- Horton, B.P. and C.L.Hunt. 1984. *Sociology; dalam A.R.Nurmanaf, Roosganda E, Rita N. S, A. Bagyo.* (2000). Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Korten, D.C.dan Sjahrir. 1984. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan.* Obor. Jakarta.
- Kurtz, M. J. 2000. Understanding Peasant Revolution: from Concept to Theory Case in Theory and Society (29:93-124). http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_5.htm. (04 Juni '06).
- Landsberger dan Alexandrov. 1981. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, dikutip dari "Social Origins of Dictatorship and Democracy" Barington Moore (1966). Boston.
- Long, N. 1987. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan.* Bina Aksara. Jakarta.
- Manning, Chris. 2000. Labour Market Adjustment to Indonesia's Economic Crisis: Context, Trend, and Implications. *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*. Vol. 36. No.1 April 2000:p.105-136. ANU Canberra.
- Marzali, A. 2003. *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan.* Obor. Jakarta.
- Masinambow, E.K.M. 1997. *Klasifikasi Tipologi Komunitas Desa di Indonesia; dalam Koenjtjaraningrat dan Antropologi di Indonesia.* Obor. Jakarta.

- Penny, D. H. 1990. Kemiskinan. Peranan Sistem Pasar. UI Press. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prakash, S. 2000. Poverty and Environment Linkages: Reflection on the Poverty Trap Thesis. CREED Working Paper No.12, February, 1997. <http://www.iied.org/docs/eep/creed12e.pdf>. (17/07/2006).
- Rachman, A. MA. 1996. Traditional Information Capture and Environmental Knowledge. *Mimbar Sosial Ekonomi (Sosek)*, 9 (2): 36-52. IPB. Bogor.
- Rambo, A.T. 1982. Human Ecology Research on Tropical Agro-ecosystems in South Asia. East-West Environment and Policy Institute. Honolulu.
- Redfield, R. 1982. Masyarakat Petani dan Kebudayaanannya. CV. Rajawali. Jakarta.
- Sajogyo. 1982. Bunga Rampai Perekonomian Desa. Obor. Jakarta dan IPB Bogor.
- Sajogyo. 1993. Partisipasi Petani. PSP. IPB. Bogor.
- Saptana, Handewi P. S. R, Tri B.P. 2003. Struktur Penguasaan Lahan dan Kelembagaan Pasar Lahan di Pedesaan; *dalam* Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah. Prosiding. (2004). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Pengembangan Pertanian (PSE). Bogor.
- Scott, J. C. 1981. Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. LP3ES. Jakarta.
- Scott, J. C. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Obor. Jakarta.
- Soekanto, S. 1984. Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, S. 2004. Sosiologi. Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumawinata, S. 2004. Politik Ekonomi Kerakyatan. Gramedia. Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia. Jakarta.
- Uphoff, N. 1992. Local Institution and Participation for Sustainable Development. IIED. London.
- Valentine, C.A. 1968. Culture and Poverty. The University of Chicago Press. Chicago & London.
- Wiradi, G. 1993. Karya Chayanov Ditinjau Kembali. Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI). IPB. Bogor.
- Wiradi. 2002. Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. Akatiga. Bandung.
- Wolf, E. R. 1985. Petani. Suatu Tinjauan Antropologis. C.V. Rajawali. Jakarta.
- Worsley, P. (editor). 1991. Pengantar Sosiologi: Sebuah Perbandingan. Jilid 1, dan Jilid 2. Penerjemah: Hartono H. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Yuliati, Y. Mangku, P. 2003. Sosiologi Pedesaan. Pondok Pustaka. Yogyakarta.